RAKYAT KALBAR

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2014 | Hal. : 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kerja Tak Becus, DPRD Desak BPK Audit PLN

PONTIANAK-RK. DPRD Kota Pontianak mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mengaudit Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Pontianak yang kerap melakukan pemadaman listrik selama Ramadan.

Wakil rakyat Kota Pontianak juga meminta Polda Kalbar untuk memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap indikasi penyalahgunaan dan penyelewengan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dilakukan PLN selama terjadi pemadaman listrik.

Seperti yang terjadi Senin (21/7) malam, PLN kembali melakukan pemadaman listrik di wilayah Sungai Raya Dalam, Pontianak Tenggara

sekitar pukul 21.00. Bahkan sebelumnya, di Kecamatan Pontianak Kota pemadaman dilakukan di saat sebagian warga tengah

■ Halaman 15

Kerja Tak Becus

.....dari halaman 9

melaksanakan ibadah salat tarawih. Di Sungai Raya, Kubu Raya, listrik padam dari sebelum magrib hingga pukul 22.00.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, HM Fauzi SSos sangat menyesalkan dan menyayangkan kebijakan pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Apalagi di waktu-waktu seperti saat berbuka puasa, salat Isya hingga sahur. "Alasan yang disampaikan PLN, dari dulu sampai sekarang tidak

pernah berubah hanya itu-itu saja," kata Fauzi, Selasa (22/7).Dia menegaskan, DPRD Kota Pontianak sudah tidak kuasa memanggil PLN untuk melakukan rapat kerja. Karena pasti alasan yang disampaikan terkait pemadaman listrik karena layangan, kerusakan mesin, atau perawatan. "Kami sudah apatis dengan PLN, rapat berkali-kali pun pemadaman terus dilakukan," kesalnya.

Yang jelas, kebijakan pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama Ramadan sangat tidak masuk akal. "Maka dari itu, kami (DPRD)

berharap BPK RI Perwakilan Kalbar untuk dapat segera melakukan audit

terhadap PLN, termasuk Ombusdman dan YLKI kami minta untuk memprotes kinerja PLN Cabang Pontianak yang tidak becus menyediakan pasokan listrik bagi masyarakat," tegasnya.

Dikatakan Fauzi, Polda Kalbar perlu campur tangan melakukanpengawasan terhadap kinerja PLN, agar tidak ada penyelewengan dan penyimpangan pasokan BBM. "Yang perlu diselidiki kepolisian, selama pemadaman listrik terjadi, pasokan solar yang tidak digunakan oleh PLN dikemanakan? "Kalau memang ada indikasi penyimpangan, maka kami

meminta kepada penegak hukum untuk menangkap dan memproses

penanggungjawab PLN," tegasnya kembali.

Warga Kota Pontianak sudah gerah dengan pemadaman listrik, namun masih saja selalu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. "Banyak aspirasi masyarakat yang mengajak untuk mendemo PLN, tapi kami masih mencoba berusaha menenangkan mereka," pungkasnya.

Patut dipertanyakan dan menimbulkan pertanyaan, Fauzi menuturkan, pemadaman listrik yang dilakukan PLN hanya diberlakukan di kawasan pemukiman masyarakat saja. Sementara kawasan industri, pusat

perdagangan modern sangat jarang merasakan pemadaman listrik. (sul)